

# META-ETIKA POLITIK DI ERA POST TRUTH

## Studi Prilaku Elit politik Perspektif Etika Emotivis Bertrand Russell

**Nurul Huda**

Universitas Nurul Jadid  
[enha300681@gmail.com](mailto:enha300681@gmail.com)

**Septiana Dwiputri Maharani**

Universitas Gadjah Mada  
[septiana.dm@ugm.ac.id](mailto:septiana.dm@ugm.ac.id)

### Abstrak

Orkestrasi politik di era post truth selain menyajikan kontestasi antar kelompok yang berkepentingan dengan menampilkan visi pembangunan ke depan, juga diramaikan penggunaan bahasa omong kosong (*bullshit*) dan berita palsu (*fake news*) oleh elit politik lewat berbagai media sosial. Tindakan etis para elit politik dengan menggunakan *bullshit* dan *fake news* di era post truth ini secara aksiologis tetap bisa dianalisis dalam perdebatan arus utama filsafat nilai yaitu obyektivisme dan subyektivisme yang berbeda dengan epistemologis yang umumnya dimaknai hanya sebagai akibat menurunnya relevansi teori-teori kebenaran. Melalui meta-etika Bertrand Russell, artikel ini berusaha membahas asal-usul etika, makna kebaikan, dan penilaian terhadap tindakan etis para elit politik. Pada akhirnya teori subyektif-emotivis Russell memberikan legitimasi dalam menilai baik buruknya tindakan etis elit politik sebebaskan dan sebatas pada keinginan masing-masing.

**Kata Kunci:** etika, tindakan etis, dan elit politik

### Pendahuluan

Di awal tahun 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merilis sejumlah laporan hoaks (kebohongan atau berita palsu) menjelang pemilu 2019. Berdasarkan siaran pers Subdit Pengendalian Konten Internet No. 01/HM/KOMINFO/01/2019 terdapat 64 informasi palsu yang tersebar melalui media sosial atau media-media online sejak bulan Agustus hingga Desember 2018.<sup>1</sup> Kemudian Kominfo juga menerima aduan konten hoaks dalam siaran pers No. 17/HM/KOMINFO/01/2019 dengan jumlah yang sangat fantastis yakni 733 aduan lewat media sosial berupa whatsapp.<sup>2</sup> Angka ini terbilang sangat besar dan jauh meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Rilis laporan Kominfo ini menunjukkan bahwa persebaran *fake new* untuk kepentingan politik menjadi tren baru. Kedua kubu sama-sama memproduksi *fake news* untuk mempengaruhi pilihan politik seseorang. Hasil riset Masyarakat Telematika menyimpulkan bahwa isu sosial politik menempati jenis hoaks

---

<sup>1</sup> Subdit Pengendalian Konten Internet, *Laporan Pileg dan Pilpres*. Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Dirjen Pengendalian Aplikasi Informatika, (Kominfo, 2018), 3-64.

<sup>2</sup> Ferdinandus Setu, Tahun 2018, Kominfo Terima 733 Aduan Konten Hoaks yang disebar Via WhatsApp, diperoleh 15 November 2020. [https://kominfo.go.id/content/detail/16003/siaran-pers-no-17hmkominfo012019-tentang-tahun-2018-kominfo-terima-733-aduan-konten-hoaks-yang-disebar-via-whatsapp/0/siaran\\_pers](https://kominfo.go.id/content/detail/16003/siaran-pers-no-17hmkominfo012019-tentang-tahun-2018-kominfo-terima-733-aduan-konten-hoaks-yang-disebar-via-whatsapp/0/siaran_pers) 2019.

tertinggi yakni 91,80%.<sup>3</sup>

Beberapa informasi yang dinilai *fake news* dan banyak mendapatkan sorotan banyak orang adalah berita tentang pemukulan Ratna Sarumpaet.<sup>4</sup> Sebelum diketahui bahwa wajah bengkoknya akibat operasi pelastik, tersebar informasi bahwa Sarumpaet dipukul beberapa orang. Informasi ini menarik perhatian banyak pihak dan bahkan dimanfaatkan oleh kubu Prabowo untuk menyerang kubu Jokowi mengingat posisi Sarumpaet termasuk anggota tim Badan Pemenangan Nasional (BPN), sebutan untuk tim sukses Prabowo. Sebelum kasus Sarumpaet muncul, masyarakat juga pernah dihebohkan oleh menghilangnya Setia Novanto ketika hendak ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Navanto yang dikabarkan menghilang, tiba-tiba tersebar kecelakaan akibat mobil yang kendarainya menabrak tiang listrik hingga dilarikan ke rumah sakit.<sup>5</sup> Banyak kalangan menilai bahwa kecelakaan Novanto hanya sandiwara saja untuk menghindari atau mengelabui KPK. Kondisi mobil yang baik-baik saja dan Novanto sendiri yang diberitakan mukanya membengkok seperti bakpao, tapi tidak terbukti, menjadi alasan kecurigaan masyarakat bahwa kecelakaan tersebut hanyalah kebohongan. Kedua contoh ini membuktikan bahwa seorang aktivis ternama dan elit politik dengan jabatan ketua DPR yang terhormat yang seharusnya memiliki tingkat kewarasan intelektual yang cukup tinggi, dianggap dapat berbohong dan menyebarkan berita palsu.

Penyebaran informasi palsu menjelang pemilu tahun 2019 bukan perkara baru, pada Pemilu Amerika tahun 2016 yang lalu juga dipenuhi berita palsu. Allcott and Gentzkow dalam artikelnya menginformasikan bahwa terdapat 115 berita palsu pro-Trump yang dibagikan di Facebook sebanyak 30 juta kali, dan 41 *fake news* pro-Clinton yang dibagikan sebanyak 7,6 juta kali.<sup>6</sup> Begitu juga penelitian lainnya mencatat bahwa di Facebook antara Februari dan November 2016 terdapat 8,7 juta *fake news*, sedangkan berita nyata hanya berkisar 7,3 juta.<sup>7</sup> Angka-angka ini menjelaskan bahwa tren produksi *fake news* dalam pemilu atau mungkin even lainnya sudah kian massif.

Pasca Pilpres Amerika yang penuh dengan berita palsu yang berhasil mengantarkan Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat ke-45, kamus Oxford memasukkan istilah “post truth” yang bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “pasca kebenaran”. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan lanskap politik dan media saat ini. Definisi post truth menurut Kamus Oxford (2016) sebagai *relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief* (berkaitan dengan atau menunjukkan keadaan di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik daripada emosi dan kepercayaan personal).

Era post truth secara epistemologis juga seringkali diidentikkan sebagai kondisi hilangnya relevansi teori-teori kebenaran yang sudah diperdebatkan sejak era logosentris seperti teori

---

<sup>3</sup> Gun Gun Heryanto, *Media Komunikasi Politik: Relasi Kuasa Media di Panggung Politik* (Yogyakarta: Ircisod: 2018), 74.

<sup>4</sup> Felix Nathaniel, Kronologi Kebohongan dan Hoaks Ratna Sarumpaet, diperoleh 12 November 2020. <https://tirto.id/c4uv>

<sup>5</sup> Mulyana, Deddy. 2018. “Komunkasi Politik antara Sains dan Seni: Suatu Pengantar,” dalam *Media Komunikasi Politik: Relasi Kuasa Media di Panggung Politik*. (Ircisod: Yogyakarta, 2018), 12-14.

<sup>6</sup> Hunt Allcott and Matthew Gentzkow, “Social Media and Fake News in the 2016 Election” dalam *Journal of Economic Perspectives*—Volume 31, Number 2, 2017, 212.

<sup>7</sup> John Corner, “Fake news, post-truth and media-political change” dalam *Media, Culture & Society*. Vol. 39 (7), 2017, 1102.

korespondensi, teori konsistensi, dan teori pragmatis (Beeman, 2018: 166-168).<sup>8</sup> Jika pada era logosentris, kebenaran diproduksi dan diukur berdasarkan kriteria rasional, logis, dan sistematis, maka pada era post truth diukur berdasarkan tingkat kepercayaan, keyakinan, dan emosional. Kondisi ini memunculkan kembali persaingan identitas primordial seseorang seperti suku, agama, madzhab, ormas dan lain sebagainya. Contoh nyata dalam politik 2019 adalah persaingan yang menggambarkan pembelahan identitas seperti pro NKRI vs pro khilafah, Islam Kaffah vs Islam Sekular, keturunan Arab vs keturunan China, asing vs asing, dan lain sebagainya.

Kendati demikian, post truth jika dilihat berdasarkan prespektif aksiologis akan memperdebatkan baik buruknya tindakan etis para elit politik, terlepas apakah tindakan tersebut benar atau salah dalam prespektif epistemologis. Dalam konteks ini, *fake news* bisa mendapatkan dasar etisnya dalam filsafat nilai Bertrand Russell yang becorak subyektifis-emosional. Nilai-nilai menurut Russell lahir dari keinginan dan sama sekali tidak mewakili fakta.<sup>9</sup> Karena ketika kita mengatakan bahwa sesuatu memiliki nilai, bagi Russell kita tidak menyatakan fakta yang terlepas dari perasaan pribadi kita, kita malah mengekspresikan emosi kita sendiri.<sup>10</sup> Dengan kata lain, baik buruknya *fake news* dan tindakan etis lainnya ditentukan oleh keinginan, bukan alasan faktual tidaknya. Manusia menurut Russell tidak dapat mencapai konsensus rasional mengenai masalah moral, karena ketika seseorang membuat penilaian terhadap orang lain, ia hanya menyatakan preferensi atau mungkin sebatas selera pribadi.<sup>11</sup> Dari sinilah segala tindakan etis para elit politik termasuk kebohongan dapat saja baik sejauh itu dikehendaki oleh pendukungnya dan menjadi buruk bagi yang tidak menghendakinya.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian filsafat dimana informasi atau data dikumpulkan dan dianalisis secara filosofis. Penelitian filsafat pada hakikatnya merupakan usaha rasional untuk menemukan arti dan makna yang dalam dari seluruh aspek pengalaman manusia atau mencari penjelasan tentang keseluruhan kenyataan, guna memperoleh kebijaksanaan hidup, sekaligus mempunyai fungsi kritis evaluatif terhadap macam-macam pengetahuan yang diberikan oleh ilmu-ilmu lain. Hal itu misalnya dilakukan dengan menggali dasar-dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis pengetahuan yang diberikan oleh ilmu-ilmu tersebut (Sudarminta, 2011: 47).<sup>12</sup>

Penelitian filsafat dalam arti operasional secara tegas juga membedakan obyek material dan obyek formal layaknya penelitian lainnya. Artinya obyek materialnya juga dapat berupa obyek empiris, tetapi menurut arti yang istimewa.<sup>13</sup> Keistimewaan ini menurut Bakker, karena obyek material filsafat terikat pada suatu obyek formal yang khas.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini obyek materialnya berupa obyek empiris yaitu perilaku politisi (tindakan etis) di era post truth yang

---

<sup>8</sup> Chris Beeman, "Losing the Feel for Truth in Post-Truth 'Democracies': When Macro Data Harvesting and Micro-Targeting Befuddle Democratic Thought," dalam *America's Post-Truth Phenomenon: When Feelings and Opinions Trump Facts and Evidence*. ed. C. G. Prado (California: Praeger, 2018), 166-168.

<sup>9</sup> Bertrand Russell, "The Place of Science in A Liberal Education," dalam *Mysticism and Logic and Other Essays* (London: George Allen and Unwin Ltd, 1917), 37.

<sup>10</sup> Risieri Frondizi, 1963. *What is Value? An Introduction to Axiology*. California: Open Court, 1963), 63.

<sup>11</sup> Michael K. Potter, *Bertrand Russell's Ethics* (London: Continuum, 2006), 61.

<sup>12</sup> J. Sudarminta, "Metode penelitian filsafat: Belajar dari Filsuf Alfred N. Whitehead," dalam *Metodologi Penelitian Filsafat*. (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 47

<sup>13</sup> Anton Bakker, 2011. "Penelitian Pada Bidang Ilmu Filsafat: Perbandingan Usulan Penelitian," dalam *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 57.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 58.

dinilai oleh sebagian masyarakat banyak menyebarkan pernyataan omong kosong (*bullshit*) dan berita bohong (*fake news*). Sedangkan obyek formalnya menggunakan prespektif etika subyektif-emotivis Bertrand Russell.

Sebagai penelitian filsafat, penggunaan etika subyektif-emotivis Russell diharapkan dapat menganalisis tindakan etis para politisi dengan berusaha menjawab pertanyaan apakah makna etika? bagaimana ia lahir? dan untuk apa ia dinilai? bukan sekedar untuk mempertanyakan apakah tindakan tersebut melanggar kode etik atau tidak. Dengan kata lain Pertanyaan-pertanyaan tersebut secara sistematis akan membahas etika secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagaimana kekhasan penelitian filsafat. Dengan demikian penelitian ini, tidak membahas etika politik dalam bentuk normatif berupa seperangkat aturan tentang baik dan buruk, melainkan pada filsafat etika atau disebut meta-etika.

### Mengenal Post Truth

Istilah post truth kali pertama diciptakan oleh Steve Tesich dalam sebuah diskusi untuk menggambarkan skandal politik seperti Watergate dan Iran-Contra Amerika. Dia menulis, “*all the dictators up to now have had to work hard at suppressing the truth. We, by our actions, are saying that this is no longer necessary ... In a very fundamental way we, as a free people, have freely decided that we want to live in some post-truth world.*”<sup>15</sup>

Kemudian istilah post truth menjadi populer dan mendapatkan perhatian publik ketika Kamus Oxford memunculkan kata tersebut pada tahun 2016.<sup>16</sup> Kemunculan post truth dalam kamus Oxford tidak lepas dari meluasnya penggunaan istilah tersebut dalam kontestasi politik, khususnya dalam pemilihan presiden Amerika Serikat dan pemungutan suara Brexit (British Exit). Dua momentum politik di kedua negara tersebut, dinilai sebagai awal penggunaan dan penyebaran pernyataan omong kosong (*bullshit*) dan *fake news* lewat media sosial.

Salah satu contoh *bullshit* yang pernah diungkapkan Trump menjelang pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2016 lalu yang menyatakan bahwa jika dirinya kalah dalam pemilihan, berarti dirinya sedang dicurangi.<sup>17</sup> Ungkapan Trump ini jelas tidak berdasarkan fakta, karena tidak ada kepastian bahwa pemilu akan berjalan curang. Sebuah pernyataan yang hampir sama diungkapkan oleh Amin Rais menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, “jika pelaksanaan pilpres tidak dicurangi kemungkinan besar paslon Prabowo-Sandi yang akan menjadi pemenangnya.”<sup>18</sup> Pernyataan ini tentu tidak berdasarkan fakta dan kebenaran, mengingat hasil survey dari lembaga survey ternama masih memenangkan Jokowi-Mu’ruf. Oleh karenanya post truth seringkali juga didefinisikan *as assertions that feel true but that have no basis in fact.*<sup>19</sup>

Fenomena post truth yang penuh dengan klaim kebenaran jika ditelusuri berakar pada teori relativisme yang meningkat akibat serangan post modernism terhadap modernisme. Penyebaran ide-ide post modernisme di masyarakat umum, telah mengguncang kepercayaan orang pada fakta-fakta obyektif dan melegitimasi apa yang disebut “fakta alternatif”.<sup>20</sup> Hanya saja yang

---

<sup>15</sup> Catherine Legg, “The Solution to Poor Opinions Is More Opinions: Peircean Pragmatist Tactics for the Epistemic Long Game” dalam *Post-Truth, Fake News Viral Modernity & Higher Education*, ed. Michael A. Peters dkk. (Singapore, Springer, 2018), 44.

<sup>16</sup> Hamid Foroughi dkk, “Leadership in a post-truth era: A new narrative disorder?” dalam *Culture & Psychology*, Vol. 23(2) 2019, 2.

<sup>17</sup> Lee McIntyre, 2018. *Post Truth* (Cambridge: MIT Press, 2018), 1-2.

<sup>18</sup> Arifianto, S. 2019. “Kontestasi Politik Pilpres 2019 di Media Sosial (Telaah Konsep *Echo Chamber*)” dalam *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*. Vol. 15 No. 2 (Juli – Desember 2019), 135.

<sup>19</sup> Beeman, “Losing...”, 166.

<sup>20</sup> Foroughi dkk. “Leadership, 3.

terjadi bukan hanya memberi jalan pada munculnya alternatif yang ditandai dengan semakin terbukanya ruang kebenaran yang semula terpinggirkan oleh teori-teori besar, tetapi juga memberi jalan pada kebohongan yang bisa diklaim memiliki tingkat kebenaran tertentu sesuai dengan doktrin relativisme bahwa semua berhak mendefinisikan kebenarannya sendiri-sendiri.

Lebih dari itu, klaim kebenaran dalam bidang politik jauh lebih nyata dan seakan semua memperlihatkan haknya masing-masing terhadap kebenaran. Semua bisa berretorika tentang apapun sebagai yang paling benar tanpa harus menunjukkan tingkat validitasnya. Di era post truth bahasa murni hanyalah strategi untuk mempengaruhi pilihan politik seseorang, tidak peduli apakah bahasa itu memiliki basis faktual atau tidak. Tujuan utamanya adalah bagaimana sebuah bahasa baik *bullshit* maupun *fake news* dapat meyakinkan masyarakat seolah-olah benar.

### *Meningkatnya Penggunaan Bullshit*

Peningkatan *Bullshit* dalam berbagai sukseksi belakangan ini, menjadikan kata ini dianggap bagian dari kriteria post truth. Reaksi Frankfurt atas peristiwa Brexit dan kemenangan Trump mengafirmasi dugaan bahwa *bullshit* termasuk post truth. Begitupun menurut Justin EH Smith (2016), bahwa kemunculan Trump se bagai elit politik yang penuh dengan *bullshit* menunjukkan adanya pengabaian terhadap kebenaran.<sup>21</sup> Frankfurt menjelaskan bahwa *bullshit*, berbeda dari kebohongan dalam niat misrepresentasinya. Seseorang yang membuat pernyataan *bullshit* tidak termasuk kebohongan, melainkan hanya nilai-nilai kebenaran dari pernyataannya tidak menjadi perhatian utama.<sup>22</sup>

Perbedaan tersebut terlihat pada respon masyarakat terhadap pernyataan *bullshit* dan kebohongan. Dalam kasus Pilpres Amerika Serikat tahun 2015, rakyat Amerika yang cenderung menerima *bullshit* Trump daripada kebohongan Hillary Clinton.<sup>23</sup> Dengan kata lain, orang cenderung memilih menjadi korban *bullshit* daripada korban kebohongan. Contoh-contoh *bullshit* yang diungkapkan kubu Prabowo seperti; ungkapan tentang prediksi bubarnya bangsa Indonesia, hanya kecurangan yang bisa mengalahkan Prabowo-Sandi, dan kekhawatiran tidak ada yang menyembah Allah kalau Prabowo-Sandi menang dan lain sebagainya, cenderung ditoleransi minimal tidak sampai dibawa ke jalur hukum. Berbeda dengan ungkapan yang dinilai bohong tentang klaim Jokowi yang menyatakan bahwa tidak ada kebakaran hutan dan lahan selama tiga tahun terakhir.<sup>24</sup> Reaksi masyarakat khususnya kubu Prabowo atas klaim Jokowi ini membuatnya dilaporkan ke Polisi.

*Bullshit* pada dasarnya ungkapan yang tidak berpijak pada fakta fakta, realitas, dan kebenaran sehingga menurut Frankfurt diterima tidaknya sangat dipengaruhi kekuatan analisis masyarakat.<sup>25</sup> Masyarakat yang lemah dalam konteks kekuatan analisis akan mudah menerima, sementara yang kuat biasanya dapat mendeteksi sutau pernyataan apakah fakta atau hanya *bullshit*. Selain faktor kelemahan analisis, keberhasilan *bullshit* sebagai strategi politik juga tergantung pada dua hal, *pertama* dapat meyakinkan khalayak dengan menampilkan gambaran seolah-olah itu adalah kebenaran, *kedua*, memanipulasi khalayak untuk salah memahami motivasi pembicara.<sup>26</sup> Tetapi dalam prakteknya kedua syarat ini juga sangat tergantung pada

---

<sup>21</sup> Bruce McChomsky, *Post Truth Rhetoric and Composition* (Logan: Utah State University Press, 2017), 11-12.

<sup>22</sup> Harry G. Frankfurt, *On Bullshit*. (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005), 54-55.

<sup>23</sup> McChomsky, *Post*. 11.

<sup>24</sup> Witri D. Insani, "Commemorate 2019 Indonesian Presidential Election: Political Clout in Identity, Millennials, and Propaganda, dalam *The Role of Identity in Politics and Policy Making*. (Surabaya: CV. Revka Prima Media, 2019) 126.

<sup>25</sup> McChomsky, *Post*...12.

<sup>26</sup> *Ibid.*,

siapa yang mengungkapkan *bullshit*.

Dalam banyak kasus, upaya mempengaruhi orang lain dengan suatu pernyataan akan berhasil bila dilakukan oleh seseorang yang memiliki posisi dan disposisi yang tinggi. Artinya *bullshit* akan diterima dan diyakini bila diungkapkan oleh elit politik yang berpengaruh. Teori *habitus* Pierre Bourdieu nampaknya relevan untuk menganalisis bagaimana bahasa *bullshit* dapat mempengaruhi orang lain. *Habitus* dalam pandangan Bourdieu meliputi, etos, eidos dan estetika,<sup>27</sup> digunakan sebagai proses strukturasi untuk mereproduksi struktur sosial. *Habitus* menurut Bourdieu adalah struktur terstruktur yang cenderung berfungsi sebagai struktur penataan struktur.<sup>28</sup> Dengan begitu *Bullshit* secara operasional bekerja seperti *habitus* akan mengalami proses strukturasi; membentuk realitas sosial hingga diyakini dan diikuti secara kolektif, meski tidak sekuat dan selama *habitus* yang dapat mempengaruhi hingga alam bawah sadar.

Dalam kalimat yang lain Bourdieu berpendapat, *social agents construct social reality, both individually and collectively, . . . The subjective structures of the unconscious that carries out (sic) the acts of construction, . . . are the product of a long, slow, unconscious process of the incorporation of objective structures.*<sup>29</sup> Pernyataan Bourdieu ini memosisikan seorang agen yang berada dipuncak struktur dapat membentuk realitas sosial (*habitus*) baik secara individu maupun kolektif. Tindakan ini mulanya merupakan tindakan subyektif yang diikuti secara kolektif melalui alam bawah sadar dan proses yang sangat panjang. *Bullshit* memang tidak seperti *habitus* dalam arti benar-benar diikuti secara sadar atau tidak, tetapi setidaknya teori Bourdieu ini bisa digunakan untuk menjelaskan bahwa pernyataan *bullshit* dari elit politik yang berpengaruh ternyata oleh kalangan tertentu diyakini sebagai realitas (kebenaran), minimal mudah viral di media massa. Pernyataan-pernyataan dari Trump, Clinton, Jokowi, Prabowo, Megawati, Amin Rais dan bahkan tokoh-tokoh agama semisal Gus Dur, Habib Rizieq dan lain sebagainya, seringkali langsung diyakini benar oleh pengagumnya tanpa proses mempertanyakan faktual tidaknya. Apapun Pernyataan mereka baik faktual maupun *bullshit* selalu menghiiasi pemberitaan dan perdebatan dalam politik belakangan ini.

Para pendukung atau pengagum agen politik selalu menjadi sasaran *bullshit*, karena mereka sudah meyakini agennya sebagai otoritas kebenaran. Mereka mencari dan menilai hanya terhadap informasi yang sudah mendukung sistem kepercayaan terbatas mereka.<sup>30</sup> Era post truth selain menandai hilangnya relevansi teori-teori kebenaran, juga meningkatnya penggunaan kepercayaan dan keyakinan yang dibangun di atas landasan primordialisme kelompok, kesukuan, ras, dan agama sebagai tolak ukur baru. Pemilu 2019 adalah contoh nyata meningkatnya penggunaan agama dalam menilai dan mendukung seorang calon presiden. Dari sini gambarannya semakin kompleks bahwa pernyataan *bullshit* akan semakin mudah dipercayai bila menyentuh nilai-nilai primordialismenya seperti sentimen agama, kesukuan, ideologi, dan identitas primordial lainnya.

### *Meningkatnya produksi dan Penyebaran Fake news*

Pada dasarnya *fake news* (berita palsu) sudah ada sejak lama dan digunakan sebagai propaganda pada masa perang dunia. Bahkan setelah Perang Dunia II, di Amerika muncul media *The Onion*, *The Daily Show*, dan *The Colbert Report* yang menyediakan berita palsu sebagai hiburan untuk melawan kekuatan dan efek propaganda politik Komunis terhadap warga Amerika

---

<sup>27</sup> Elizabeth B. Silva, "Habitus: Beyon Sosiologi" dalam *The Sociological Review* Vol. 64, 2016, 76.

<sup>28</sup> Pierre Bourdieu, *The Logic of Practice* (Cambridge: Polity Press, 1992), 53.

<sup>29</sup> Pierre Bourdieu, *The State Nobility* (Cambridge: Polity Press, 1996), 29.

<sup>30</sup> McChomsky, *Post...*39.

Serikat.<sup>31</sup> Hanya saja *fake news* di era post truth berbeda dengan era sebelumnya; pra truth atau truth.

*Fake news* di era post truth tidak berfungsi sebagai humor dan hiburan, karena ia justru oleh kalangan tertentu diyakini kebenarannya sehingga dapat menyesatkan pembaca. Perbedaan utama antara propaganda dan *fake news* menurut Martin (1929) adalah propaganda tidak selalu menghindari kebenaran, tetapi lebih pada upaya untuk membujuk konsumennya daripada memberi tahu mereka, umumnya dengan sikap pro-otoritas seperti yang secara tradisional terlihat pada masa perang.<sup>32</sup> Sementara *fake news* bukan untuk membujuk, tetapi benar-benar menyebarkan informasi dengan tujuan menyesatkan pembaca. Salah satu contoh, di Amerika terdapat *fake news* yang pernah menghebohkan, yaitu informasi yang menyebut adanya teroris yang berpakaian badut. Sebenarnya banyak orang yang tidak mempercayainya, tetapi mereka tetap menarik perhatian dengannya. Meski begitu, tetap memicu aksi kriminal yang sebenarnya, karena ada warga yang melakukan persekusi terhadap seseorang yang berpakaian badut hanya karena dianggap berperilaku mencurigakan.<sup>33</sup> Dalam kasus ini perbedaan antara benar dan salah, nyata dan palsu, desas-desus dan ancaman menjadi kabur.

Kasus serupa juga banyak terjadi di Indonesia seperti informasi penculikan anak sekolah yang meresahkan warga sekolah (wali murid, pengelolaan, guru) hingga terdapat peraturan di beberapa sekolah tentang antar jemput anak-anak mengharuskannya di pintu sekolah. Begitu juga dengan informasi pedagang yang menjual makanan beracun atau memabukkan, tidak jarang memicu persekusi terhadap pedagang di sekolah. Dalam konteks pemilu di Indonesia, *fake news* jauh lebih banyak lagi dan menghiasi pemberitaan yang disebar di media sosial, terutama menyangkut hasil survey, hasil *cuick count*, dan hasil pemungutan suara di sejumlah tempat. Bahkan sampai terjadi saling deklarasi kebenaran seperti pada pemilu 2014 dan 2019.

*Fake news* nampaknya lebih berbahaya daripada *bullshit* meski sama-sama tanpa dasar faktualitas, karena *bullshit* tidak sampai menyesatkan pembaca. Allcott and Gentzkow mendefinisikan *fake news* sebagai *news articles that are intentionally and verifiably false, and could mislead readers artikel* (berita yang sengaja dan tidak benar, salah, dan dapat menyesatkan pembaca).<sup>34</sup> Definisi Allcott and Gentzkow ini didasarkan pada sejumlah artikel dengan konten *fake news* yang memiliki implikasi politik, khususnya pada pemilihan presiden AS tahun 2016 yang lalu. Banyak situs-situs yang Allcott and Gentzkow sebutkan sebagai penyedia atau penyebar artikel *fake news*, seperti *denverguardian.com*, *wtoe5news.com*, dimana artikel-artikel tersebut dibagikan lebih dari satu juta kali di Facebook.<sup>35</sup> Secara umum link web-web ini disebar melalui situs media sosial seperti Facebook dan Twitter, sehingga dapat menyebar lebih cepat.<sup>36</sup>

Kemudian Allcott and Gentzkow (2016: 214) juga membuat kriteria informasi yang dapat disebut *fake news* antara lain; 1) kesalahan pelaporan yang tidak disengaja, 2) rumor yang tidak berasal dari artikel berita tertentu, 3) teori konspirasi, (informasi yang sulit untuk diverifikasi apakah benar atau salah, tetapi biasanya diyakini benar), 4) sindiran yang disalah-artikan sebagai faktual, 5) pernyataan salah oleh elit politik, dan 6) laporan miring tetapi tidak sepenuhnya salah. Dari sekian kriteria *fake news* ini, Allcott and Gentzkow (2016: 214) member istilah “distorsi”,

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, 14-15.

<sup>32</sup> Colin C. Barton, “Critical Literacy in the Post-Truth Media Landscape” dalam *Policy Futures in Education* 0(0) 1–13, 2019, 4.

<sup>33</sup> McChomsky, *Post...*15.

<sup>34</sup> Allcott and Gentzkow, “Social...”, 213.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 2014

<sup>36</sup> Barton, “Critical..” 3.

bukan informasi yang sudah melawati berbagai tahap penyaringan.<sup>37</sup> Itu sebabnya *fake news* dianggap merupakan bentuk retorika post truth yang berbahaya, dan media sosial berperan secara eksponensial meningkatkan masalah kesalahan informasi ini.<sup>38</sup>

Fenomena meningkatnya *fake news* melalui media sosial dalam politik ternyata sudah menjadi perhatian Kominfo. Baru-baru ini lembaga yang memiliki kemampuan mendeteksi persebaran *fake news* mengungkapkan ciri-ciri *fake news*. Staff Ahli Kominfo, Henri Subiako, mengatakan “saat kita terima atau membaca informasi dapat membuat kita membenci orang lain atau kelompok tertentu dan biasanya juga diminta untuk memviralkan dengan kata-kata ‘viralkan’, ‘tolong disebar’, dan ‘jangan berhenti di sini,’ ketika ada kata-kata atau kalimat seperti itu merupakan ciri-ciri *fake news* yang seharusnya jangan sampai disebar lebih luas lagi.”<sup>39</sup>

Ciri-ciri yang disampaikan Kominfo cukup jelas dan menjelaskan bagaimana *fake news* selain berisi kebohongan, juga bermain dengan informasi dan kata-kata yang dapat mempengaruhi perasaan seseorang. Baru-baru ini terdapat gelombang kerusuhan di Papua yang penyebabnya diduga karena terdapat *fake news* seorang guru yang mengucapkan kata-kata rasial lewat media sosial. Contoh ini membuktikan bahwa telah terjadi pergeseran paradigma dari informatif menjadi profokatif dimana perasaan tentang sesuatu lebih penting daripada apa yang orang lain tahu tentangnya.<sup>40</sup> Dengan kata yang lebih sederhana telah terjadi pergeseran dari informasi ke emosi.

### **Memotret Etika Normatif Politik di Era Post Truth**

Dalam bidang politik, Max Weber merumuskan dua etika politik yakni etika tanggung jawab dan etika keyakinan. Etika tanggung jawab menuntut aktor politik untuk memperhatikan dan menerima konsekuensi dari setiap tindakan yang dia lakukan sebagai pemimpin, terlepas dari apakah hasilnya sesuai yang diharapkan atau tidak.<sup>41</sup> Dalam konteks pemilihan seperti pada pemilu 2019, masing-masing aktor politik Jokowi dan Prabowo yang memiliki etika tanggungjawab seharusnya menerima apapun hasilnya meski kekalahan tidak diharapkan. Demikian juga dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) yang menuai protes dan gelombang demo mahasiswa harus diterima sebagai konsekuensi dari kebijakan yang dinilai tidak pro pemberantasan korupsi.

Sedangkan Etika keyakinan menuntut agar aktor politik menempuh jalan tindakan yang mereka yakini benar meski menuai kritik dan dinilai salah oleh orang lain.<sup>42</sup> Etika ini memberi landasan etis bagi aktor politik untuk mencapai visi dan misinya yang mungkin saja bisa selaras atau tidak dengan harapan rakyatnya. Dalam beberapa kasus seperti Hitler, Soeharto, Saddam Husen dan pemimpin diktator lainnya, menurut etika keyakinan dapat dibenarkan dengan alasan untuk melaksanakan keyakinan pemimpin. Seorang presiden Jokowi tidak dianggap menyalahi

---

<sup>37</sup> Allcott and Gentzkow, “Social...”, 214.

<sup>38</sup> McChomsky, *Post..* 19

<sup>39</sup> Anoname, Ini Cara Mudah Kenali Hoaks di Media Sosial!, diperoleh 15 November 2020. [https://www.kominfo.go.id/content/detail/15941/ini-cara-mudah-kenali-hoaks-di-media-sosial/0/berita\\_satker.2019](https://www.kominfo.go.id/content/detail/15941/ini-cara-mudah-kenali-hoaks-di-media-sosial/0/berita_satker.2019).

<sup>40</sup> Craig Cormick, “Public attitudes toward new technologies: Our posttruth, post-trust, post-expert world demands a deeper understanding of the factors that drive public attitudes” dalam *Science Progress*. Vol. 102 (2), 2019. 164.

<sup>41</sup> David Owen dan Tracy B. Strong, “Introduction: Max Weber's Calling to Knowledge and Action,” dalam *The Vocation Lectures: ‘Science as a Vocation’ ‘Politics as a Vocation’* trans. Rodney Livingstone (Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing Company, 2004), xli.

<sup>42</sup> John Boswell dkk, “Politics and Science as a Vocation: Can Academics Save us from Post-Truth Politics?” dalam *Political Studies Review* 1–16, 2019, 3.



etika politik apabila dalam memenuhi nawa citanya harus membangun tol yang hanya menguntungkan kelas menengah dan merugikan rakyat kecil karena terpaksa menjual lahannya yang berimplikasi pada kehilangan pekerjaannya.

Kedua etika tersebut seolah-olah bertolak belakang atau mengandung ambivalensi, karena satu sisi terdapat pembenaran terhadap perilaku politik yang bertanggungjawab terhadap segala konsekuensi kebijakannya, pada sisi yang lain seorang pemimpin juga dibenarkan untuk tidak peduli terhadap tanggapan dan respon rakyatnya dengan alasan melaksanakan keyakinan atau visi-misi pemimpin. Walaupun mengandung ambivalensi, aktor politik yang matang, menurut Weber, adalah orang yang mampu menyeimbangkan dua etika ini satu sama lain.<sup>43</sup> Weber mengatakan, *In this sense an ethics of conviction and an ethics of responsibility are not absolute antitheses but are mutually complementary, and only when taken together do they constitute the authentic human being who is capable of having a "vocation for politics."* (etika keyakinan dan etika tanggung jawab bukanlah antitesis absolut, tetapi saling melengkapi, dan hanya jika dilakukan bersama-sama dapat membentuk manusia otentik yang mampu memiliki "panggilan untuk politik").<sup>44</sup>

Kesan ambivalensi etika politik pada dasarnya mewakili perdebatan konsep etika dan filsafat nilai secara umum antara obyektivisme dan subyektivisme. Obyektivisme yang menguasai abad pertengahan (pra modern) dan modern dengan landasan teosentrisme dan logosentrisme menyebabkan ajaran etika dari peradaban lemah dan kecil terpinggirkan oleh sistematisasi dan kategorisasi universalitas etis yang digagas oleh institusi agama dan negara.<sup>45</sup> Kemudian proyek pra-modernisme dan modernisme dengan universalitas etisnya dianggap gagal karena mengandung tindakan sewenang-wenang dan monopoli etika. Gugatan ini menandai era baru yang dikenal post modernisme yang menolak *claim of ethics* atau *claim of truth* yang dibangun pada era pra-modernisme dan modernisme. Bagi post modernisme kisah-kisah besar (teori-teori besar dalam berbagai bidang kehidupan seperti pengetahuan, kesenian, ekonomi, dan politik yang diproduksi dengan fungsi mengarahkan hidup manusia kepada titik emansipasi) sudah kehilangan daya pikatnya dan karena itu sudah mulai ditinggalkan.<sup>46</sup>

Selanjutnya post modernisme memberikan legitimasi terhadap berbagai etika yang diproduksi oleh budaya yang berbeda-beda, Obyektivisme dan universalisme moral berganti menjadi relativisme moral. Post modernisme menolak segala usaha universalisasi, obyektivasi, dan pemaknaan tunggal terhadap satu konsep etika atau satu tindakan etis tertentu. Sebagai gantinya setiap individu, setiap kelompok, dan setiap kebudayaan memiliki hak untuk merumuskan konsep etika sesuai dengan kearifan lokal masing-masing.

Tetapi problem utama relativisme adalah kenyataan bahwa hampir semua orang menolak sistem etis seperti politik rasistis yang pernah terjadi di Afrika Selatan dan Jerman, politik sentralistik-meliteristik Orde Baru, dan sistem amoral lainnya yang menunjukkan kesewenang-wenangan, kelaliman, dan segala bentuk penindasan lainnya. Kalau suatu pandangan yang membawa konsekuensi-konsekuensi tidak benar berdasarkan logika, menurut K. Bertens itu berarti bahwa pandangan itu sendiri tidak benar.<sup>47</sup> Relativisme mengakui adanya sistem etika yang beragam dan menolak universalitas, namun fakta adanya penolakan umum terhadap sistem etis yang menurut logika tidak benar justru menunjukkan universalitas itu ada. Kenyataan ini

---

<sup>43</sup> *Ibid.*,

<sup>44</sup> Max Weber, *The Vocation Lectures: 'Science as a Vocation' 'Politics as a Vocation'* trans. Rodney Livingstone (Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing Company, 2004), 92. Lihat juga Boswell dkk, "Politics..", 3.

<sup>45</sup> Michelle Smirnova, "Authenticity as (post-) modern ethics: An analysis of the *New York Times'* Ethicist column," dalam *Journal of Sociology* 1–15, 2017, 3.

<sup>46</sup> K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer: Prancis* (Jakarta: Gramedia), 348-349.

<sup>47</sup> K. Bertens, 2013. *Etika*. Edisi Revisi (Yogyakarta: Kanisius, 2013), 123.

menjadi perdebatan utama yang melahirkan arus besar dalam kajian etika dan filsafat nilai secara umum.

Namun di era post truth, normatisasi etis justru mulai kehilangan relevansi dan urgensinya sehingga yang terjadi seakan masyarakat kehilangan alat atau cara untuk menilai segala bentuk tindakan etis, moral dan amoral, baik dan buruk, benar dan salah. Kesan utama yang nampak adalah perbedaan tegas antara baik dan buruk, benar dan salah menjadi kabur, karena semuanya dapat mengklaim sebagai yang baik dan benar. Satu-satunya alat yang digunakan masyarakat belakangan ini untuk mengukur benar dan salah mungkin hanya norma hukum. Di luar itu perilaku etis para elit politik seperti pernyataan *bullshit* dan *fake news* tidak dapat dinilai buruk selama tidak ada yang mempersoalkannya dalam ranah hukum.

Runtuhnya etika normatif di era post truth ini, sejatinya menjadi pendorong untuk mengkaji etika lebih mendasar dan filosofis. Dalam kondisi, di mana masyarakat sedang kehilangan tolak ukur etis, penting untuk menghadirkan pertanyaan-pertanyaan; apakah makna baik dan buruk mesti dicapai secara konsensus? apakah kode etik selama ini sudah mewakili seluruh diktum baik dan baruk? dan apakah ada standarisasi logis yang absah dan tidak terbantahkan dalam menilai tindakan etis elit politik? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang berusaha dijawab dengan meminjam perspektif etika subyektif-emosional Russell dalam bahasan berikut.

### **Meta-Etika Politik dalam Pemikiran Bertrand Russell**

Bertrand Russell yang hidup dari tahun 1872 hingga 1970 merupakan filsuf Inggris yang teorinya sangat berpengaruh dalam perkembangan filsafat analitik yang dikenal dengan sebutan atomisme logis. Teori ini berusaha menelanjangi struktur hakiki bahasa dan dunia dengan mempelajari fakta-fakta dalam suatu proposisi (Bertens, 1983: 25-32).<sup>48</sup> Selain itu, Russell tidak hanya membicarakan konsep analitik saja, ia juga banyak menaruh perhatian pada bidang-bidang lainnya seperti politik, agama, dan etika sebagaimana yang menjadi fokus dalam artikel ini.

Gagasan Russell tentang nilai, berorientasi pada usahanya untuk memahami sifat-sifat etika dari tindakan etis seseorang mulai pernyataan, sikap, hingga penilaian. Melalui pengalaman hidupnya menyaksikan berbagai peperangan besar seperti perang dunia pertama, kedua, dan perang dingin, Russell berusaha memebangun teori etika subyektifnya dengan menelusuri arti kebaikan, asal usul kebaikan, dan bagaimana menilai tindakan etis seseorang. Russell seakan mempertanyakan apakah etika itu (ontologi), bagaimana ia hadir (epistemology), dan untuk apa ia diimplementasikan (aksiologi). Kajiannya yang sangat filosofis tentang etika, membuat gagasannya layak digolongkan ke dalam meta-etika.

#### *Memaknai Kebaikan*

Sebagai seorang penganut etika subyektif, Russell menganggap sumber etika adalah keinginan (hasrat). Russell, mengatakan *The meaning of "good" is connected with desire... Anything that we all desire is "good" and anything that we all dread is "bad"*.<sup>49</sup> Dengan mendasarkan makna kebaikan pada hasrat, menjadikan makna "baik" selain bersifat subyektif, juga berpotensi berubah-ubah sesuai dengan tabiat hasrat yang berubah-ubah. Keinginan bisa berubah karena keadaan, keyakinan, waktu dan tempat di mana kita hidup, dan bahkan perubahan kimiawi dalam tubuh.<sup>50</sup> Meskipun terdapat rumusan kebaikan intrinsik, bagi Russell

---

<sup>48</sup> K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX Jerman-Inggris* (Jakarta: Gramedia, 1983), 25-32.

<sup>49</sup> Bertrand Russell, "Science and Ethics," dalam *Religion and Science* (USA: Oxford University Press. 1974), 231.

<sup>50</sup> Michael K. Potter, *Bertrand Russell's Ethics* (London: Continuum, 2006), 93.

(tetapi kebaikan tersebut tetap diharapkan ada untuk kepentingan kita sendiri.<sup>51</sup> Itu artinya, Russell sama saja mengatakan tidak ada nilai intrinsik atau independen. Tindakan etis seseorang atau elit politik bersifat temporal, “baik” sejauh masih sesuai dengan hasratnya, dan dapat berubah “buruk” jika tidak lagi sesuai dengan hasratnya. Jika demikian bagaimana ketika seorang elit politik menghasrati sesuatu dengan cara membuat pernyataan *bullshit* dan *fake news*?

Tindakan etis dalam padangan Russell seharusnya dilakukan sesuai keinginan, sementara keinginan diarahkan sebanyak mungkin kepada kebaikan dan sesedikit mungkin kepada kejahatan. Dari sini seorang elit politik seharusnya melakukan tindakan etis dengan beorientasi pada kebaikan. Meski begitu bagi Russell tetap tidak ada instrumen yang relevan dalam menyelesaikan bagaimana tujuan kebaikan dapat dicapai. Oleh sebab itu menurutnya kita tidak dapat membuktikan bahwa pandangan kita tentang kehidupan yang baik adalah benar, kita hanya bisa menyatakan pandangan kita dan berharap orang lain sebanyak mungkin akan setuju.<sup>52</sup> Russell mengatakan:

“...when we try to be definite as to what we mean when we say that this or that is "the Good," we find ourselves involved in very great difficulties... in a question as to whether this or that is the ultimate Good, there is no evidence either way; each disputant can only appeal to his own emotions, and employ such rhetorical devices as shall rouse similar emotions in others.”<sup>53</sup>

Pernyataan Russell tersebut menegaskan adanya kesulitan yang sangat besar ketika mencoba memaknai sebuah pernyataan *bullshit*, *fake news*, dan tindakan etis lainnya apakah seperti ini atau itu “baik”. Jika terdapat sebuah pertanyaan apakah ini atau itu adalah kebaikan utama, bagi Russell tidak ada evidensi (bukti) yang dapat mendukung jawaban tersebut, karena setiap pihak hanya dapat menarik emosinya sendiri-sendiri, dan menggunakan alat retorika seperti yang akan membangkitkan emosi yang sama pada orang lain. Dari sini setiap tindakan etis seorang elit politik pada dasarnya tidak memiliki bukti apakah itu baik atau buruk, sehingga seluruh yang disampaikan terkait cita-cita suci, janji-janji konkrit, dan kompetensi yang lebih baik dalam memimpin atau tindakan etis berupa kebohongan, tidak dapat dimaknai tunggal sebagai sebuah tindakan moral atau amoral.

### *Melacak Asal Usul Etika*

Gagasan Russell dalam filsafat nilai, khususnya di bidang etika berbeda dengan gagasan atomisme logisnya yang fokus utamanya menelaah fakta-fakta dengan melibatkan penginderaan. Nilai-nilai menurut Russell adalah produk dari keinginan dan tidak mewakili fakta tentang dunia.<sup>54</sup> Fokus utama etika bagi Russell terletak pada apa yang kita inginkan. Russell mengatakan:

“By imposing these wishes on the universe, we deceive ourselves, and perhaps others, into believing that the objects of our wishes are objective facts. Indeed, the appearance of objectivity may be used to persuade others to share our desires. We come to believe that the universe is teleological, that it has goals, and that those goals are similar to ours. On the other hand, 'The kernel of the scientific outlook is the refusal to regard our own desires, tastes and interests as affording a key to the understanding of the world.’”<sup>55</sup>

Pernyataan Russell ini mengungkapkan bahwa selama ini kita semua berada dalam kepura-

---

<sup>51</sup> Russell, “Science..” 229.

<sup>52</sup> Potter, *Bertrand*, 93.

<sup>53</sup> Russell, “Science..” 229.

<sup>54</sup> Bertrand Russell, “The Place of Science in A Liberal Education,” dalam *Mysticism and Logic and Other Essays* (London: George Allen and Unwin Ltd. 1917) 37.

<sup>55</sup> Potter, *Bertrand*, 57.

puraan mempercayai obyek-obyek yang kita yakini merupakan fakta obyektif. Alam semesta yang umumnya diyakini bersifat teleologis (memiliki tujuan) bagi Russell, selalu diharapkan sesuai dengan keinginan kita. Padahal pandangan ilmiah yang menekankan obyektivitas menolak keterlibatan keinginan, selera, dan minat dalam memahami dunia.

Dengan demikian, asal usul etika bagi Russell adalah hasrat terhadap obyek tertentu, “baik” jika selaras dengan keinginan dan “buruk” jika tidak selaras. Dalam kehidupan sehari-hari, serigkali baik dan buruk diakui dan berlaku dalam kelompok tertentu. Dari sini Russell mengakui adanya hasrat personal (hasrat pribadi) dan impersonal (hasrat yang selalu berhubungan dengan hasrat orang lain). Hanya saja Russell (1917: 82) mengatakan:

“Ethics is essentially a product of the gregarious instinct, that is to say, of the instinct to co-operate with those who are to form our own group against those who belong to other groups. It is tribal, then, involving at least a tacit acknowledgment that those in our group generally tend to be good, and pursue ‘desirable ends’ - while those in other groups are generally evil, pursuing ‘nefarious’ ends.”<sup>56</sup>

Etika bagi Russell merupakan produk naluri atau hasrat untuk berteman atau bekerjasama dengan membentuk suatu kelompok bersama, kemudian muncul primordialisme yang menganggap kelompok sendiri umumnya dinilai baik, sedangkan kelompok yang lain dinilai jahat. Hal ini yang terjadi dalam politik, dimana satu kelompok selalu merasa baik atau lebih baik dari kelompok lainnya. Maka tidak heran dalam setiap kampanye, partai politik melalui kontestannya selalu memposisikan dan menjanjikan keadaan yang baik dan lebih baik. Russell sendiri menganggap etika terkait erat dengan politik dalam upayanya untuk mengembalikan keinginan kolektif suatu kelompok untuk ditanggung individu; atau upaya seseorang untuk menyebabkan keinginannya menjadi keinginan kelompoknya. (Potter, 2006: 94).<sup>57</sup>

Namun hasrat kerjasama dalam satu kelompok seperti dalam partai politik tentu tidak serta merta dapat diwujudkan, karena antar individu dapat memiliki naluri dan hasrat yang berbeda sehingga potensi terjadinya konflik antar anggota selalu terbuka. Menyikapi persoalan seperti ini, setiap individu bagi Russell membutuhkan pengorbanan dan selalu diyakinkan tentang adanya kepentingan bersama. Etika menurut Russell adalah seni merekomendasikan kepada orang lain pengorbanan yang diperlukan untuk kerjasama.<sup>58</sup> Sayangnya Russell tidak menjelaskan secara lengkap tentang konsepsi pengorbanan seperti apa yang dimaksud, tidak seperti Rene Girard yang cukup utuh menjelaskan konsepsi korban, sakralitas, dan kambing hitam yang mengalihkan potensi kekerasan dalam satu kelompok.

Melalui karyanya yang berjudul *Violence and The Sacred*, Girard mengatakan *violence is not to be denied, but it can be diverted to another object* (kekerasan atau konflik tidak dapat ditolak, tetapi dapat dialihkan ke objek lain).<sup>59</sup> Dari sini seorang elit politik untuk diterima oleh komunitasnya harus melakukan pengorbanan, bukan mengorbankan dirinya melainkan intervensi pihak ketiga yang dalam bahasa Girard disebut kambing hitam.<sup>60</sup> pengorbanan dapat berupa persembahkan atau ritual yang kemudian disakralkan oleh suatu komunitas tertentu. Simbol-simbol yang disakralkan dalam partai politik seperti ideologi, bendera, pakaian, dan ritual-ritual (jika ada) pada dasarnya merupakan simbol pengalihan kekerasan sekaligus simbol persatuan dan keharmonisan. Seorang elit politik ketika memasuki suatu partai politik tentu harus mentaati simbol-simbol sakral tersebut sebagai sebuah pengorbanan yang dapat mengalihkan bermacam-

---

<sup>56</sup> Russell, “The Place...” 82.

<sup>57</sup> Potter, *Bertrand*, 94.

<sup>58</sup> *Ibid.*, 58.

<sup>59</sup> Rene Girard, *Violence and The Sacred*, trans. Patrick Gregory (Maryland: The Johns Hopkins University Press, 1977), 6.

<sup>60</sup> Shinhunata, 2006. *Kambing Hitam: Teori Rene Girard* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), 203-205.

macam hasrat yang berbeda-beda ke dalam hasrat kelompok.

### *Menilai Tindakan Etis Elit Politik*

Penilaian terhadap tindakan etis elit politik berdasarkan teori hasrat Russell hanya berlaku pada kelompok tertentu dan tidak mungkin mencapai konsensus obyektif atau universal. Russell mengatakan, *As there is no consensus of opinion about ethics, it must be understood that what follows is my personal belief, not the dictum of science* (tidak ada konsensus pendapat tentang etika, harus dipahami bahwa yang berikut adalah keyakinan pribadi saya, bukan diktum sains).<sup>61</sup> Kenyataan ini menurut Russell menjadikan nilai tidak memiliki tempat di dalam sains dan tidak dapat digunakan sebagai bagian dari proyek ilmiah: deskripsi dunia yang lengkap dan akurat.<sup>62</sup> Obyektivitas yang menjadi ciri sains selalu bercorak positivistik yakni suatu upaya pemurnian pengetahuan dari kepentingan-kepentingan manusiawi, seperti klaim moralitas yang tidak dapat diverifikasi.<sup>63</sup>

Pertanyaan tentang nilai secara umum menurut Russell terletak di luar domain sains, bahkan di luar wilayah pengetahuan. Russell mengatakan, *there is no ethical knowledge, because there is no ethical truth*. Dengan kata lain, ketika kita menyatakan suatu nilai bahwa seorang elit politik ini baik karena berkata jujur atau buruk karena suka mengungkapkan kalimat *bullshit* dan *fake news*, pada dasarnya kita memberikan ekspresi pada emosi kita sendiri, bukan pada fakta tentang baik dan buruk. Suatu tindakan etis dinilai baik bila selaras dengan hasrat dan emosi kita, sebaliknya menjadi buruk bila bertentangan dengan hasrat dan emosi tersebut. Dari sini nilai dalam pandangan Russell termasuk subyektif-emotivis, karena mendasarkan pada keinginan (hasrat) dan emosi. Dalam hal ini posisi Russell hampir sama dengan teori emotivisme Ayer yang hanya mendasarkan pada emosi sebagai kriteria baik dan buruk atau benar dan salah.<sup>64</sup>

Studi etika menurut Russell adalah upaya - walaupun tidak berhasil - melepaskan diri dari subjektivitas, sehingga secara tradisional, terdiri dari dua bagian, yang satu berkaitan dengan aturan moral, yang lain dengan apa yang baik dengan sendirinya (intrinsik).<sup>65</sup> Tetapi keseluruhannya, baik aturan moral dan nilai intrinsik tetap berkaitan erat dengan hasrat. Berbagai macam kode etik dalam politik seperti aturan partai, kampanye, pemilihan dan lain sebagainya tentu dibuat atas dasar keinginan bersama, setidaknya terdapat keinginan mayoritas orang yang berwenang mengesahkannya. Demikian yang disebut nilai intrinsik yang dianggap tidak dipengaruhi subyek pada kenyataannya tetap didasarkan pada keinginan.

Kemudian Pertanyaan berikutnya adalah, jika tindakan etis seorang elit politik hanya didasarkan pada hasratnya, bagaimana ia bisa mewakili hasrat banyak orang yang bisa berbeda dengan hasrat kelompoknya, karena seorang elit politik seharusnya juga negarawan? Russell sendiri mengakui bahwa kadang-kadang semua keinginan dalam suatu kelompok dapat dipenuhi, sedangkan dalam kasus lain kepuasan beberapa keinginan dalam kelompok tidak sesuai dengan keinginan orang lain.<sup>66</sup> Oleh karena itu, jawaban Russell terletak pada proses kematangan emosi dan intelektual seseorang. Jika kita matang secara emosional dan intelektual, kita mendambakan kehidupan yang harmonis, kehidupan di mana tindakan didominasi oleh hasrat permanen yang

---

<sup>61</sup> Russell, "Science..", 223.

<sup>62</sup> Potter, *Bertrand*, 57.

<sup>63</sup> Francisco Budi Hardiman, 1990. *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*. Yogyakarta: Kanisius, 1990), 23-26.

<sup>64</sup> Russell, "Science..", 230-231.

<sup>65</sup> *Ibid.*, 223-224.

<sup>66</sup> Bertrand Russell, *An Outline of Philosophy* (Revised edition. London: Routledge, 1995), 186.

konsisten.<sup>67</sup> Dalam hal ini penilaian terhadap tindakan etis elit politik seperti suka berkata *bullshit* dan suka menyebarkan *fake news* sejauh ini hanya dapat dinilai karena emosi dan intelektualnya kurang matang, sehingga tidak selaras dengan yang kita inginkan. Seorang elit politik tidak cukup hanya bermodal *will to power* (hasrat berkuasa), ia perlu kematangan emosi dan intelektual agar tindakan etisnya beorientasi pada keharmonisan orang lain. Tetapi penilaian ini tetap tidak bisa diverifikasi karena bagi kelompok yang diuntungkan, pernyataan *bullshit* dan *fake news* bahkan baik dan diperlukan.

Etika menurut Russell terkait erat dengan politik dalam arti terdapat upaya untuk membawa keinginan kolektif suatu kelompok untuk ditanggung individu, atau sebaliknya upaya untuk membawa keinginan individu menjadi keinginan kelompoknya.<sup>68</sup> Russell mengakui adanya hasrat pribadi dan hasrat impersonal. Tetapi baik dan buruk dalam pandangannya tetap lahir dari hasrat membela kelompok sendiri yang memiliki arti bahwa tindakan etis para elit politik secara umum selalu mendapatkan pembelaan dari kelompoknya masing-masing. Seorang Trump berapapun besarnya kritik dan ketidaksukaan dunia terhadap tindakan etisnya, tetap mendapatkan pembelaan dari pendukungnya. Begitu juga dalam pemilu 2019, real-tidaknya janji-janji Jokowi selalu dipermasalahkan oleh kubu Prabowo tetapi tetap mendapatkan pembelaan dari pendukungnya. Hal ini juga berlaku sama pada Prabowo. Dari sini baik-buruk benar-benar tidak memiliki obyektivitas, karena bagi Russell keinginan tidak pernah mencapai konsensus rasional. Penilaian baik dan buruk hanya persoalan hasrat antara kelompok yang menginginkan dengan yang tidak menginginkan, Prabowo dan Jokowi selalu baik bagi kelompok yang menghendaki jadi presiden dan selalu buruk bagi yang tidak menghendakinya.

Tindakan etis seorang elit politik dalam pandangan Russell hanya didasarkan pada legitimasi kelompok, karena seluruh etika menurut Russell *more or less subjective*.<sup>69</sup> Dari sini persoalan etika politik seakan hanya persoalan dua kubu yang memiliki hasrat yang berbeda. Dalam konteks pemilu 2019, persoalan baik dan buruk berdasarkan prespektif ini mungkin hanya menggambarkan pertarungan hasrat kubu Jokowi dan kubu Prabowo. Lalu bagaimana dengan kelompok yang dianggap memiliki pandangan kritis dan konsisten dalam memandang tindakan etis para elit politik; mengkritik jika dianggap keliru dan mendukung jika dianggap benar? Bila menganggap hasrat sebagai sumber etika, maka bisa jadi penilaian kita menyimpulkan bahwa kelompok yang ditengah-tengah ini bukanlah kelompok yang memiliki hasrat langsung terhadap sesuatu yang mereka dukung atau mereka kritisi. Atau bisa jadi jawabannya adalah ketika kelompok yang dikategorikan netral ini mendukung atau membenarkan suatu pernyataan dari elit politik, berarti pernyataan tersebut selaras dengan yang mereka inginkan, begitu juga sebaliknya. Etika subyektivisme selalu memberikan alternatif jawaban yang tidak pernah tunggal.

Dari uraian ini, apapun bentuk tindakan etis para elit politik, baik yang suka berbicara jujur atau berbohong, nilai baik dan buruknya tergantung pada hasrat yang menilai. Maraknya *bullshit* dan *fake news* di era post truth juga tidak bisa dinilai secara serta merta buruk, meski jelas-jelas sudah melenceng dari kode etik tertentu. Karena bagaimanapun penilaian kita terhadap tindakan etis para elit politik itu dipengaruhi oleh keinginan kita dan sangat mungkin bisa berbeda dengan kelompok lain, sehingga tidak ada standarisasi obyektif. Dengan begitu semua juga bebas menilai tindakan etis para elit politik sesuai hasrat masing-masing. Penilaian yang tidak dibenarkan dalam konsepsi etika Russell ini ketika kita memutlakkan penilaian kita bahwa elit politik yang suka membuat pernyataan *bullshit* dan menyebar *fake news* pasti buruk dan salah

---

<sup>67</sup> Potter, *Bertrand*, 84.

<sup>68</sup> Russell, "Science..", 232

<sup>69</sup> Potter, *Bertrand*, 58.

atau elit politik yang suka berkata jujur pasti baik. Karena baik dan buruk pada dasarnya adalah merujuk pada emosi kita sendiri.

## Penutup

Meningkatnya penggunaan dan penyebaran bahasa *bullshit* dan *fake news* dalam politik di era post truth, memang terkesan merasahkan dan mengganggu sebagian orang. Tetapi penilaian terhadap perilaku tersebut tidak dapat mencapai kesepakatan rasional dan obyektif. Teori meta-etika Bertrand Russell yang menekankan pada subyektif-emosi yang memberikan pemahaman mendasar bahwa etika lahir dari hasrat dan hanya dapat dimaknai dengan menghubungkannya dengan hasrat sehingga penilaian terhadapnya selalu merujuk pada hasrat.

Keinginan menjadi sumber etika dalam arti setiap tindakan etis yang dianggap baik karena sesuai dengan yang diinginkan, begitu juga sebaliknya. Nilai dalam pandangan Russell tidak akan pernah mencapai konsensus obyektif apalagi universal, karena setiap penilaian terhadap tindakan etis pada dasarnya selalu merujuk pada kondisi hasrat dan emosi bukan terhadap fakta baik dan buruk. Labelisasi jujur atau pembohong terhadap elit politik sebenarnya didasarkan pada hasrat dan emosi penilai, karena baik dan buruk tidak bisa ada dengan sendirinya tanpa berhubungan dengan keinginan.

Gagasan Russell tentang etika pada akhirnya memberikan kebebasan dan batasan kepada siapapun untuk menilai tindakan etis para elit politik sesuai dengan keinginan masing-masing. Tidak adanya obyektivitas “kebaikan” dan “keburukan” dalam pandangan Russell mencukupkan legitimasi penilaian menjadi hak semua orang, kelompok, suku, agama, dan lainnya sebagainya. Relativitas nilai ini diharapkan dapat memberikan kesadaran bahwa baik dan buruk bisa berbeda-beda, sehingga sama sekali tidak dibenarkan adanya *claim of ethics*.

## Daftar Pustaka

- Allcott and Gentzkow, Hunt. Matthew. 2017. “Social Media and Fake News in the 2016 Election” dalam *Journal of Economic Perspectives*—Volume 31, Number 2
- Arifianto, S. 2019. “Kontestasi Politik Pilpres 2019 di Media Sosial (Telaah Konsep *Echo Chamber*)” dalam *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*. Vol. 15 No. 2 (Juli – Desember 2019)
- Bakker, Anton. 2011. “Penelitian Pada Bidang Ilmu Filsafat: Perbandingan Usulan Penelitian,” dalam *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Barton, Colin C. 2019. “Critical Literacy in the Post-Truth Media Landscape” dalam *Policy Futures in Education* 0(0) 1–13
- Beeman, Chris. 2018. “Losing the Feel for Truth in Post-Truth ‘Democracies’: When Macro Data Harvesting and Micro-Targeting Befuddle Democratic Thought,” dalam *America’s Post-Truth Phenomenon: When Feelings and Opinions Trump Facts and Evidence*. ed. C. G. Prado. California: Praeger.
- Bertens, K. 1983. *Filsafat Barat Abad XX Jerman-Inggris*. Jakarta: Gramedia.
- Bertens, K. 2001. *Filsafat Barat Kontemporer: Prancis*. Jakarta: Gramedia
- Bertens, K. 2013. *Etika*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Kanisius
- Boswell dkk, John. 2019. “Politics and Science as a Vocation: Can Academics Save us from Post-Truth Politics?” dalam *Political Studies Review* 1–16

- Bourdeau, Pierre. 1992. *The Logic of Practice*. Cambridge: Polity Press.
- Bourdieu, Pierre. 1996. *The State Nobility*. Cambridge: Polity Press
- Cormick, Craig. 2019. "Public attitudes toward new technologies: Our posttruth, post-trust, post-expert world demands a deeper understanding of the factors that drive public attitudes" dalam *Science Progress*. Vol. 102(2)
- Corner, John. 2017. "Fake news, post-truth and media-political change" dalam *Media, Culture & Society*. Vol. 39 (7).
- Foroughi dkk, Hamid. 2019. "Leadership in a post-truth era: A new narrative disorder?" dalam *Culture & Psychology*, Vol. 23(2)
- Frankfurt, Harry G. 2005. *On Bullshit*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Fronzoni, Risieri. 1963. *What is Value? An Introduction to Axiology*. California: Open Court.
- Girard, Rene. 1977. *Violence and The Sacred*, trans. Patrick Gregory. Maryland: The Johns Hopkins University Press
- Hardiman, Francisco Budi. 1990. *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*. Yogyakarta: Kanisius
- Heryanto, Gun Gun. 2018. *Media Komunikasi Politik: Relasi Kuasa Media di Panggung Politik*. Ircisod: Yogyakarta
- Insani, Witri D. 2019. "Commemorate 2019 Indonesian Presidential Election: Political Clout in Identity, Millennials, and Propaganda, dalam *The Role of Identity in Politics and Policy Making*. Surabaya: CV. Revka Prima Media.
- Legg, Catherine. 2018. "The Solution to Poor Opinions Is More Opinions: Peircean Pragmatist Tactics for the Epistemic Long Game" dalam *Post-Truth, Fake News Viral Modernity & Higher Education*, ed. Michael A. Peters dkk. Singapore, Springer.
- McChomsky, Bruce. 2017. *Post Truth Rhetoric and Composition*. Logan: Utah State University Press.
- Mcintyre, Lee. 2018. *Post Truth*. Cambridge: MIT Press
- Mulyana, Deddy. 2018. "Komunkasi Politik antara Sains dan Seni: Suatu Pengantar," dalam *Media Komunikasi Politik: Relasi Kuasa Media di Panggung Politik*. Ircisod: Yogyakarta.
- Owen, David dan Strong, Tracy B. 2004. "Introduction: Max Weber's Calling to Knowledge and Action," dalam *The Vocation Lectures: 'Science as a Vocation' 'Politics as a Vocation'* trans. Rodney Livingstone. Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing Company.
- Peters, Michael A. 2018. "The History and Practice of Lying in Public Life" dalam *Post-Truth, Fake News Viral Modernity & Higher Education*, ed. Michael A. Peters dkk. Singapore, Springer.
- Potter, Michael K. 2006. *Bertrand Russell's Ethics*. London: Continuum.
- Russel, Bertrand. 1974. "Science and Ethics," dalam *Religion and Science*. USA: Oxford University Press.
- Russell, Bertrand. 1917. "The Place of Science in A Liberal Education," dalam *Mysticism and Logic and Other Essays*. London: George Allen and Unwin Ltd.
- Russell, Bertrand. 1995. *An Outline of Philosophy*. Revised edition. London: Routledge
- Shinhunata, 2006. *Kambing Hitam: Teori Rene Girard*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Silva, Elizabeth B. 2016. "Habitus: Beyon Sosiologi" dalam *The Sociological Review* Vol. 64, 73–92, 76.
- Smirnova, Michelle. 2017. "Authenticity as (post-) modern ethics: An analysis of the *New York Times*' Ethicist column," dalam *Journal of Sociology* 1–15
- Subdit Pengendalian Konten Internet, 2018. *Laporan Pileg dan Pilpres*. Direktorat Pengendalian



- Aplikasi Informatika, Dirjen Pengendalian Aplikasi Informatika, Kominfo.
- Sudarminta, J. 2011. "Metode penelitian filsafat: Belajar dari Filsuf Alfred N. Whitehead," dalam *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Weber, Max. 2004. *The Vocation Lectures: 'Science as a Vocation' 'Politics as a Vocation'* trans. Rodney Livingstone (Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing Company).

### **Sumber dari Intenet**

- Ferdinandus Setu, 2019. Tahun 2018, Kominfo Terima 733 Aduan Konten Hoaks yang disebar Via WhatsApp, diperoleh 15 November 2020. [https://kominfo.go.id/content/detail/16003/siaran-pers-no-17hmkominfo012019-tentang-tahun-2018-kominfo-terima-733-aduan-konten-hoaks-yang-disebar-via-whatsapp/0/siaran\\_pers](https://kominfo.go.id/content/detail/16003/siaran-pers-no-17hmkominfo012019-tentang-tahun-2018-kominfo-terima-733-aduan-konten-hoaks-yang-disebar-via-whatsapp/0/siaran_pers)
- Felix Nathaniel, 2018. Kronologi Kebohongan dan Hoaks Ratna Sarumpaet, diperoleh 12 November 2020. <https://tirto.id/c4uv>
- Anoname 2019, Ini Cara Mudah Kenali Hoaks di Media Sosial!, diperoleh 15 November 2020. [https://www.kominfo.go.id/content/detail/15941/ini-cara-mudah-kenali-hoaks-di-media-sosial/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/content/detail/15941/ini-cara-mudah-kenali-hoaks-di-media-sosial/0/berita_satker)